BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur adalah komponen penting yang harus diperhatikan dengan hati-hati. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia memproyeksikan penggunaan dana pembangunan infrastruktur tahun 2024 secara strategis untuk mencapai hasil yang nyata. Misalnya, dalam sektor konektivitas dan transportasi, anggaran akan difokuskan pada pembangunan sejumlah proyek, termasuk jalan baru sepanjang 271,2 kilometer, jalan tol sepanjang 50,8 kilometer, dan pengembangan jalur kereta api dengan total panjang 7.451 kilometer. Selain itu, rencananya mencakup pembangunan jembatan baru dengan panjang total 4.796,2 meter, jalan layang, jalan bawah tanah, serta terowongan dengan total panjang 796,2 meter dan 2.231,1 meter, yang semuanya menjadi bagian integral dari upaya peningkatan konektivitas.¹ Pengalokasian anggaran yang cermat dan terperinci untuk proyek-proyek ini, yang bertujuan mendukung transformasi ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas hidup seluruh penduduk Indonesia, adalah suatu tugas yang kompleks dan membutuhkan perencanaan yang matang.

Tanah adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang sangat berharga. dan menjadi salah satu aspek penting kekayaan alam yang amat berharga bagi

¹ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231128134841-4-492673/kebijakan-infrastruktur-2024-dukung-modernisasi-pemerataan> diakses 3 Maret 2024 pukul 03:11.

kelangsungan kehidupan manusia di seluruh dunia. Tanah memainkan peran penting sebagai sumber daya alam yang krusial bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, sehingga menjadi pentingnya intervensi pemerintah dalam mengatur pemanfaatannya. Pembangunan dan tanah merupakan dua elemen yang berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Tanpa kehadiran tanah, pelaksanaan pembangunan akan sangat sulit, sehingga vital bagi kemajuan suatu bangsa, termasuk Indonesia, untuk memperhatikan hal ini.² Analogi fondasi bangunan mencerminkan hubungan esensial antara tanah dan pembangunan; sebagaimana sebuah bangunan tak bisa berdiri tanpa fondasi yang solid, demikian pula pembangunan akan terhambat tanpa lahan yang tepat. Perumpamaan ini menekankan pentingnya tanah dalam proses pembangunan.

Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh sumber daya alam di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berada di bawah kendali pemerintah atau negara termasuk semua lembaga yang mengelolanya, dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan, dan keamanan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1960 menyatakan:

“Hak penguasaan negara memberikan kewenangan kepada negara untuk

² Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, (Malang: PUSDERANKUM dan Bayumedia Publisng, 2007). 1-2.

mengatur dan mengelola peruntukan, pemanfaatan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa”.³

Ketentuan pada pasal di atas mengandung arti bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan asas mendasar dalam pemanfaatan fungsi sumber daya alam, seperti tanah dan air. Dengan kata lain, mengatur penggunaan dan penggunaan sumber daya alam, termasuk dalam pembangunan nasional, harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama.

Pembangunan nasional yang ditujukan untuk mewujudkan amanat Pembukaan UUD 1945 terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahun. Dilihat dari salah satu aspeknya, pembangunan dalam skala nasional bertujuan guna kesejahteraan bersama harus terus dilaksanakan sesuai dengan perkembangan penduduk yang terus meningkat dan kebutuhan masyarakat termasuk penyediaan fasilitas umum yang membantu memastikan kenyamanan dalam beraktivitas bagi penduduk. Fasilitas umum ini dirancang dan dibangun oleh pemerintah dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat serta memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan. Pembangunan gedung-gedung publik memerlukan penggunaan sumber daya alam, termasuk juga tanah. Oleh karena itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur masalah pertanahan secara teliti, yang kemudian dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Dalam situasi ini, ketika tanah dialokasikan untuk pembangunan demi kepentingan umum, kepemilikan tanah tersebut dapat dicabut atau diambil alih

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, UU No. 5 Tahun 1960, LN No. 104 TLN No. 2043, Pasal 2 ayat (2) huruf a.

berdasarkan pertimbangan kepentingan sosial masyarakat yang terkait dengan tanah tersebut.⁴ Dalam proses ini, prioritas diberikan kepada kepentingan masyarakat secara keseluruhan daripada kepentingan individu dalam penggunaan tanah. Pada umumnya, Proses pengambilan tanah melibatkan dialog langsung antara pihak yang membutuhkan tanah untuk proyek pembangunan masyarakat dan pemilik tanah yang terlibat.

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Perolehan Lahan untuk Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, proses pengambilan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum dapat diatur.

Upaya untuk menyediakan akses infrastruktur demi pembangunan di Indonesia ditunjukkan dengan pengadaan tanah ini. Tujuan dari pembebasan lahan adalah untuk membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat serta perkembangan wilayah itu sendiri. Langkah-langkah yang diambil bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat regional.

Menurut Maria S.W. Sumardjono, pengadaan tanah merupakan cara yang digunakan pemerintah untuk mendapatkan lahan yang akan digunakan dalam proyek pembangunan, terutama untuk kepentingan umum. Secara prinsip,

⁴ Bernand Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Regulasi Kompensasi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2011). 3.

pengadaan tanah dilakukan melalui negosiasi antara pihak yang memerlukan tanah dan pemilik lahan yang akan digunakan untuk proyek tersebut.⁵

Perkembangan wilayah yang diharapkan melalui proses pengadaan tanah sesuai dengan definisi yang diberikan dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Menurut undang-undang ini, proses pemindahan kepemilikan tanah dikenal sebagai pengadaan tanah, di mana diberikan kompensasi dengan nominal yang dianggap sesuai dan juga berkeadilan bagi pihak yang memiliki hak atas wilayah tersebut. Sebagai hasilnya, kompensasi disediakan bagi beberapa orang yang akan melepaskan kepemilikan hak atas tanah, kepemilikan hak atas bangunan, fasilitas juga properti lainnya. Adanya kompensasi memadai dan adil, yang mencakup ganti rugi atas kerugian, seharusnya memungkinkan pemilik tanah untuk meningkatkan taraf hidupnya dibandingkan sebelumnya yang perlu direalisasikan oleh pemerintah dan dimanfaatkan sebaik mungkin guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk ilustrasi, tanah diambil untuk pembangunan Jalan Senayan Lamusung di Kecamatan Poto Tano dan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat. Hal ini dijelaskan dalam Rancangan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumbawa Barat, yang diatur oleh Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2020 tentang RTRW Sumbawa Barat periode 2020-2040.⁶

Penelitian ini sangat penting dilakukan karena dalam pengembangan

⁵ Maria S.W. Sumardjono, 2008, *Tanah Dalam perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 280.

⁶ Hasil Wawancara dengan Firmansyah Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sumbawa Barat Bagian Tata Ruang pada 25 Februari 2024 pukul 15:30 WIB.

infrastruktur, proses pengadaan lahan untuk kepentingan umum harus sejalan dengan pertumbuhan populasi dan kepemilikan tanah di suatu daerah, sebagaimana yang tercatat dalam data dari BPN RI tahun 2024 membuktikan bahwa penggunaan anggaran pembangunan untuk infrastruktur bidang konektivitas dan transportasi akan difokuskan pada pembangunan sejumlah proyek seperti jalan, jembatan, jalur kereta api, bandara dan pelabuhan.⁷ Dari data diatas dapat dipastikan jumlah lahan yang dibutuhkan dalam hal ini juga akan semakin meningkat seiring dengan populasi yang terus meningkat juga. Oleh sebab itu, penulis berminat untuk menyelidiki dan menilai pelaksanaan pengadaan tanah serta perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah dalam konteks proyek pembangunan Jalan Senayan Lamusung di Kabupaten Sumbawa Barat yang dijelajahi dalam penelitian ini.

Pembangunan Jalan Senayan Lamusung ini dilatarbelakangi karena pembangunan menjadi prioritas daerah yang terdapat dalam PERDA Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2021-2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Barat, untuk mendukung pengembangan wilayah Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan Misi ke-6 yaitu mewujudkan kemantapan infrastruktur daerah dengan meningkatkan kemantapan infrastruktur kebinamargaan, meningkatkan aksesibilitas dan kualitas jalan dan jembatan, serta meningkatkan pembangunan jalan baru untuk mendukung pengembangan wilayah strategis daerah. Hal ini diperkuat dengan adanya aspirasi dari Penduduk Desa melalui

⁷ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231128134841-4-492673/kebijakan-infrastruktur-2024-dukung-modernisasi-pemerataan>, *Op. cit.*

Kepala Desa Senayan, Kepala Desa Tapir, Kepala Desa Ari Suning, dan Kepala Desa Lamunga serta didampingi oleh Camat Seteluk dan Camat Poto Tano.⁸

Sebelum dilakukannya pembebasan lahan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Sumbawa Barat melalui Bina Marga dan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan terlebih dahulu melakukan sosialisasi tentang Rencana Pembangunan Jalan Senayan Lamusung yang bertempat di Gedung Olahraga Kecamatan Seteluk. Respon positif yang diterima Pemerintah dari Penduduk Desa dibuktikan dengan kesiapan untuk menandatangani berita acara rencana pembebasan lahan untuk Pembangunan Jalan Senayan Lamusung. Penduduk yang terdampak merasa sangat antusias serta memberi respon yang baik, karena dengan adanya Pembangunan Jalan Senayan Lamusung maka nilai ekonomis tanahnya akan meningkat.⁹

Berdasarkan hasil evaluasi, pembebasan lahan Jalan Senayan Tapir sendiri sudah finalisasi atau 100% (seratus persen) terbayar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, meskipun terdapat beberapa pihak yang masih belum menemukan ketetapan harga dan pelunasan pembayaran. Terdapat 18 bidang tanah yang akan dialokasikan di Desa Air Suning, di Desa Tapir ada 40 bidang tanah, di Desa Lamusung 13 bidang tanah, di Desa Persiapan Seteluk Rea 18 bidang tanah, dan di Desa Senayan 42 bidang tanah. Saat proses penyuluhan diadakan oleh pihak terkait, hampir 90 persen pemilik

⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sumbawa Barat pada 25 Februari 2024 pukul 15:17 WIB.

⁹ <https://www.kec-seteluk.go.id/berita/sosialisasi-ded-pembangunan-jalan-senayan-tapir-lamusung-tahun-2023> diakses 25 Februari 2024 pukul 23:59 WIB.

lahan yang hadir memberikan dukungan langsung terhadap rencana Pembangunan akses jalan baru tersebut dan juga bersedia untuk melepas hak atas tanah yang dimilikinya. Namun, sebagian kecil pemilik lahan lainnya menolak untuk menyerahkan lahan masyarakat kepada pemerintah. Dari lahan yang akan dibebaskan, sekitar 17.70% merupakan lahan sawah tadah hujan, sementara sisanya adalah lahan perkebunan yang ditanami dengan pohon jati dan manggar.¹⁰

Berkaitan dengan Pembangunan Jalan Senayan Lamusung Kabupaten Sumbawa Barat dalam PERDA Nomor 11 Tahun 2020 Tentang RTRW, arah kebijakan penataan ruang dalam PERDA RTRW Sumbawa Barat diantaranya pasal 5 ayat (4), yaitu mengembangkan sistem jaringan infrastruktur untuk mewujudkan integrasi layanan transportasi darat, laut, dan udara, serta meningkatkan akses jaringan jalan ke wilayah pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pariwisata, industri, dan daerah lainnya.¹¹ Hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada mata pencarian penduduk dari 5 desa yang terdampak dari adanya pembangunan jalan baru, mengakibatkan lahan yang tadinya berfungsi sebagai lahan pertanian, perkebunan dan peternakan justru akan menjadi berkurang akibat dari Pembangunan Jalan Senayan Lamusung. Pengalihan lahan yang dilakukan juga akan mengakibatkan lahan sawah tada hujan menjadi berkurang luasnya akibat jalan umum. Hal inilah yang nantinya mengakibatkan produktivitas pangan Seperti bahan makanan

¹⁰ Hasil wawancara, *Op.cit.*

¹¹ Hasil wawancara, *Ibid.*

utama, berbagai jenis buah, sayuran, dan sebagainya akan berkurang dan menurun, lahan pertanian pun menjadi sempit dikarenakan alih fungsi lahan.¹²

Berdasarkan dari apa yang telah penulis jelaskan di atas, menjadi dasar bagi penulis untuk membahas dan mengungkapkannya dalam penelitian berjudul: “PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIBEBAHKAN (STUDI KASUS PEMBANGUNAN JALAN SENAYAN LAMUSUNG KABUPATEN SUMBAWA BARAT)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Senayan Lamusung Kabupaten Sumbawa Barat?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah yang dibebaskan guna Pembangunan Jalan Senayan Lamusung Kabupaten Sumbawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks dari rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengadaan tanah

¹²<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40930/t/Pengusaha+Pengembang+Harus+Perhatikan+AlihFungsi+Lahan+Pertanian+Jadi+Permukiman#:~:text=Dampak%20alih%20fungsi%20lahan%20pertanian,sayur%2C%20dan%20lain%2Dlain> diakses 28 Maret 2024 pukul 17:00 WIB.

untuk pembangunan Jalan Senayan Lamusung di Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah dalam pembangunan Jalan Senayan Lamusung di Kabupaten Sumbawa Barat.

D. Orisinalitas Penelitian

1. **Suhadi** (2019) dalam tulisannya berjudul "*Legal Protection of Village Land for Infrastructure Development in Indonesia*" mengatakan bahwa pemerintah desa, kabupaten/kota, dan provinsi tidak hanya bertanggung jawab atas perubahan penggunaan tanah desa untuk pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum. **Suhadi** melakukan penelitiannya di Indonesia dengan menggunakan metode yuridis normatif dalam proses pengambilan data. Hasil studinya menunjukkan bahwa yang terjadi adalah tanah desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur diberikan ganti rugi berupa tanah pengganti.¹³ Berbeda dengan Sahudi, Penelitian berjudul "*Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dan Pelindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik Atas Tanah Yang Dibebaskan (Studi Kasus Pembangunan Jalan Senayan Lamusung Kabupaten Sumbawa Barat)*" ini membahas mengenai pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembanguan jalan baru untuk mendukung

¹³ Suhadi. Legal Protection of Village Land for Infrastructure Development in Indonesia. *Proceedings of the 2nd International Conference on Indonesian Legal Studies (ICILS)*, 363, (Januari 2019).

pengembangan wilayah strategis daerah, dengan subyek (individu, tempat, atau objek yang diamati dalam penelitian) dan objek (pokok persoalan yang akan diamati dan diteliti) yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Penulis melakukan penelitian ini di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat dengan menekankan pada Permasalahan terkait proses Ganti Rugi.

2. **Deo Enggartiasto, Setiowati, Rochmat Martanto** (2021) dalam tulisannya berjudul *“Problematika Dan Solusi Pada Pengadaan Tanah Jalur Kereta Api Bandara Yogyakarta Internasional Airport”* menerangkan tentang pertama, jangka waktu pemberian dana kompensasi kepada Masyarakat yang memenuhi syarat pendanaan LMAN dan kedua dasar pembuktian kelayakan kompensasi untuk bidang tanah yang diberikan kepada peserta PTSL 2019 yang sertifikatnya dikeluarkan berdasarkan IPL. Peneliti melakukan penelitiannya di Kabupaten Kulon Progo, dengan menerapkan metode penelitian kualitatif di dalamnya dengan pendekatan deskriptif, dalam hal ini data diperoleh dari berbagai pihak yang penulis anggap penting untuk terlibat langsung dalam proses untuk pengadaan tanah. Temuan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat sebuah proses verifikasi dan validasi yang dilakukan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) yang berbeda dari yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.¹⁴ Berbeda dengan penelitian di atas, penelitian yang berjudul “*Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dan Pelindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik Atas Tanah Yang Dibebaskan (Studi Kasus Pembangunan Jalan Senayan Lamusung Kabupaten Sumbawa Barat)*” ini membahas mengenai pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan baru untuk mendukung pengembangan wilayah strategis daerah, dengan subyek (individu, tempat, atau objek yang diamati dalam penelitian) dan objek (pokok persoalan yang akan diamati dan diteliti) yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Penulis melakukan penelitian ini di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat dengan menekankan pada Permasalahan terkait proses Ganti Rugi.

3. **Dwi Nurul Aulia Pattiha, Jemmy Jefry Pietersz, Novyta Uktolseja** (2023), dalam tulisannya berjudul “*Pelindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Dalam Proses Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*” Dalam tulisannya penulis menjelaskan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat memicu sengketa. Penelitian dilakukan di Kabupaten Kulon Progo dengan menggunakan metode hukum normatif yang menggabungkan pendekatan problematis, yaitu pendekatan hukum dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum

¹⁴ Enggartiasto, D., Setiowati, S., & Martanto, R. Problematika Dan Solusi Pada Pengadaan Tanah Jalur Kereta Api Bandara Yogyakarta Internasional Airport. *Tunas Agraria*, 4, No.1, (2016): 40-53, ISSN 2622-9714.

sangat rentan terhadap perselisihan jika tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum mencakup perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Kontroversi dapat timbul selama proses ini jika keempat tahap tersebut tidak dijalankan dengan baik. Akibatnya, pemilik hak atas tanah memiliki kapasitas untuk mengambil tindakan hukum guna melindungi hak mereka, dengan tujuan mengganti kerugian yang dialami masyarakat.¹⁵ Berbeda dengan penelitian di atas, penelitian yang berjudul “*Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dan Pelindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik Atas Tanah Yang Dibebaskan (Studi Kasus Pembangunan Jalan Senayan Lamusung Kabupaten Sumbawa Barat)*” ini membahas mengenai pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan baru untuk mendukung pengembangan wilayah strategis daerah, dengan subyek (individu, tempat, atau objek yang diamati dalam penelitian) dan objek (pokok persoalan yang akan diamati dan diteliti) yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Penulis melakukan penelitian ini di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat dengan menekankan pada Permasalahan terkait proses Ganti Rugi.

4. I Made Suardana, Prof. Dr. Johannes Ibrahim Kosasih, S.H., M. Hum. Dr. I Nyoman Sukandia, S.H., M.H. (2023), “Legal

¹⁵ Pattiha, D. N. A., Pietersz, J. J., & Uktolseja, N. (2023). Pelindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Dalam Proses Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *PATTIMURA Law Study Review*, 1, No.1, (2023): 14-21, ISSN 3025-2245.

Protection of Citizens/Residents Land Rights in Relation to the Badung Regional Regulation on the Gator Subroto-Canggu Road Development Plant” menerangkan tentang hak-hak warga telah diabaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek Jalan Gatot Subroto-Canggu. Kurangnya peraturan yang jelas dan jadwal yang jelas untuk proyek tersebut telah menyebabkan ketidakpastian hukum dan ekonomi bagi warga yang terkena dampak. Peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Badung, Bali dengan menggunakan metode mengeksplorasi konteks hukum dan peraturan pembebasan lahan untuk proyek-proyek publik di Indonesia, dengan menekankan pentingnya hak-hak warga negara dan kompensasi yang adil. Analisis ini menggali hukum dan peraturan yang relevan dan peraturan yang relevan, termasuk Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan perencanaan tata ruang daerah. Hasil studi menunjukkan bahwa perlu pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negara dalam konteks pembangunan infrastruktur dan menggarisbawahi pentingnya menelaraskan kepentingan umum dan hak milik individu dalam kerangka hukum Indonesia.¹⁶ Berbeda dengan penelitian di atas, penelitian yang berjudul *“Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dan Pelindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik Atas Tanah Yang Dibebaskan (Studi Kasus Pembangunan*

¹⁶ I Made Suardana, Johannes Ibrahim Kosasih, I Nyoman Sukandia. Legal Protection of Citizens/Residents Land Rights in Relation to the Badung Regional Regulation on the Gatot Subroto-Canggu Road Development Plan. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 6, No.8, (2023).

Jalan Senayan Lamusung Kabupaten Sumbawa Barat)” ini membahas mengenai pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan baru untuk mendukung pengembangan wilayah strategis daerah, dengan subyek (individu, tempat, atau objek yang diamati dalam penelitian) dan objek (pokok persoalan yang akan diamati dan diteliti) yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Penulis melakukan penelitian ini di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat dengan menekankan pada Permasalahan terkait proses Ganti Rugi.

5. **Riki Riki Wahyu Saputra** (2020), *“Pelindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum (Studi Kasus Di Kuta Lombok Tengah)”* menjelaskan tentang kurangnya alokasi anggaran pemerintah untuk pembebasan lahan jalan, serta tantangan yang dihadapi oleh penduduk yang tanahnya terkena dampak proyek pembangunan jalan karena ketidaksepakatan mengenai jumlah kompensasi yang diberikan oleh pemerintah yang dianggap kurang memuaskan. Peneliti melakukan penelitian ini di Kabupaten Lombok Tengah dengan penggunaan metode normatif empirisnya merupakan penelitian yang mengkaji dan mengamati secara langsung penerapan norma-norma hukum pada bidang studinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi atas tanah untuk kepentingan umum harus didasarkan pada prinsip keadilan. Meskipun ada jaminan yang memadai bagi pemilik hak, kendala utamanya adalah keterbatasan sumber daya negara dalam

pengadaan tanah.¹⁷ Berbeda dengan penelitian di atas, penelitian yang berjudul “*Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dan Pelindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik Atas Tanah Yang Dibebaskan (Studi Kasus Pembangunan Jalan Senayan Lamusung Kabupaten Sumbawa Barat)*” ini membahas mengenai pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan baru untuk mendukung pengembangan wilayah strategis daerah, dengan subyek (individu, tempat, atau objek yang diamati dalam penelitian) dan objek (pokok persoalan yang akan diamati dan diteliti) yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Penulis melakukan penelitian ini di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat dengan menekankan pada Permasalahan terkait proses Ganti Rugi.

¹⁷ Saputra, R. W. Pelindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Yang Terkena Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum (Studi Kasus Di Kuta Lombok Tengah), (2020).